

***Cyber Warfare* Antara Armenia-Azerbaijan 2020: Komparasi Strategi Media Sebagai Medan Perang Strategis**

Maghfirotul Abidah

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur
maghfirotulabidah895@gmail.com

Abstract

The war over territory between Armenia and Azerbaijan, which has been going on for a long time with the use of the military and allies in its strategy, is now increasingly complex by placing the media as an important role in the digital world era, especially in the re-emergence of the war between the two countries in 2020. Narratives have been used since 1990s, but in 2020 the level of complexity is getting higher. The media as one of the cyber war strategies acts as a strategic field for information battles between the two countries by competing to attract public sympathizers through narratives that describe the justification for their actions. Differences in regulations regarding freedom of information give rise to significant strategic differences between Armenia and Azerbaijan, which is the focus of this paper which will form a comparison. In analyzing the phenomenon of different strategic media in cyber warfare, researchers used qualitative descriptive methods with data documentation collection techniques by reading data in classical Realism theory and then presenting the results in research results. In this article, a comparison will be presented that researchers found through data that has been carried out through a triangulation process..

Keywords: Cyber War, Media, Strategy, Comparison

Abstrak

Perang Perebutan wilayah antara Armenia-Azerbaijan yang sejak lama terjadi dengan penggunaan militer dan aliansi dalam strateginya, kini semakin kompleks dengan menempatkan media sebagai pemegang peran penting dalam era dunia yang serba digital, khususnya pada meletusnya kembali perang kedua negara tahun 2020. Narasi memang dipergunakan sejak 1990-an, namun pada 2020 tingkat kompleksitas semakin tinggi. Media sebagai salah satu strategi *cyber warfare* berperan sebagai ladang strategis pertempuran informasi kedua negara dengan berlomba menarik simpatisan publik melalui narasi yang menggambarkan pembenaran tindakan mereka. Perbedaan regulasi mengenai kebebasan informasi melahirkan perbedaan strategi yang signifikan antara Armenia dan Azerbaijan merupakan fokus dalam penulisan ini yang akan membentuk komparasi. Dalam pembacaan fenomena perbedaan strategi media dalam *cyber warfare*, peneliti menggunakan metode qualitative deskriptif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan membaca data dalam teori klasik Realisme lalu menyajikan hasilnya ke dalam hasil penelitian. Dalam artikel ini, akan disajikan komparasi yang ditemukan peneliti melalui data yang telah diverifikasi melalui proses triangulasi.

Kata Kunci: *Cyber Warfare*, Media, Strategi, Komparasi

Copyright (c) 2024 Maghfirotul Abidah

✉ Corresponding author: Maghfirotul Abidah

Email Address: maghfirotulabidah895@gmail.com (Jl. Ahmad Yani No.117, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jatim)

Received 21 September 2024, Accepted 29 September 2024, Published 9 October 2024

PENDAHULUAN

Cyber warfare atau perang siber menjadi salah satu ancaman terbesar di masa globalisasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi yang semakin pesat meninggalkan dampak krusial terhadap keamanan berupa teknologi digital dan internet, dimana mereka sangat efisien untuk dijangkau dimanapun, dalam rangka menyerang pihak lawan. Banyak kemudian yang memanfaatkan kemudahan zaman kontemporer ini untuk kepentingan mereka dalam rangka menyerang negara, kelompok atau pihak lawan. *Cyber Warfare* dogolongkan sebagai tindakan agresi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan seperti negara, kelompok, individu, organisasi yang

menggunakan media komputer, infrastruktur, jaringan komputer dalam rangka menyerang pihak lawan. *Cyber warfare* dalam era kontemporer ini sangat banyak macamnya, tidak hanya melibatkan serangan infrastruktur dan jaringan internet, namun kini juga memanfaatkan media dengan target utama opini publik. Ancaman ini meningkatkan dinamika keamanan dunia yang semakin kompleks. Sejalan dengan perkembangan teknologi pula, *cyber warfare* dalam pemanfaatannya terhadap media telah menjadi elemen penting dalam strategi perang siber. Media zaman ini pun menjadi alat penting untuk mencapai tujuan dari kelompok-kelompok kepentingan seperti pengaruh politik, peretas kampanye, atau pencurian data, sehingga media kini tak lagi netral. *Cyber warfare* dengan memanfaatkan media menargetkan opini publik, salah satunya tercermin dari konflik perang perebutan wilayah Nagorno-Kharabakh antara Armenia dan Azerbaijan yang meletus kembali pada tahun 2020 silam.

Konflik Armenia Azerbaijan merupakan konflik yang telah lama terjadi sejak melemahnya kekuatan Uni Soviet pada Perang Dunia II. Konflik ini patut menjadi sorotan dunia disebabkan atas dampaknya terhadap kemanusiaan yang memakan ribuan korban jiwa serta jutaan orang yang pada akhirnya memilih mengungsi. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap dinamika keamanan. Stabilitas keamanan kedua wilayah antara Armenia dan Azerbaijan bisa diatasi ketika mereka masih bergabung dalam Uni Soviet, namun ketika Soviet mengalami kelemahan pada 1980-an, konflik 6 tahun ini pecah kembali pasca Nagorno Kharabakh menyatakan bergabung dengan Armenia pertama kali pada 1991 dan perang secara brutal dimulai pada tahun yang sama. Ketika terdapat Intervensi Rusia 1994, Nagorno-Kharabakh diberikan otonom mandiri, sehingga kurva konflik tidak terdapat eskalasi secara tajam. Namun, kembali terjadi peningkatan eskalasi konflik pada rentang waktu 2006-2015, khususnya ketika penembakan helikopter Armenia oleh Azerbaijan akhir 2014. Lalu pada 2016 konflik kembali memanas disebabkan bentrokan 4 hari atau bentrokan April antara pertahanan Artsakh dan tentara Azerbaijan.

Konflik ini berkali-kali telah diupayakan mediasi sebagai resolusi konflik oleh beberapa aktor, seperti OSCE (*Organization for Security and Co-operation in Europe*) membentuk Minsk Group yang diketuai oleh Prancis, Rusia dan US. Mereka dibentuk atas konflik Nagorno-Kharabakh dengan misi mencari solusi akhir, namun pihak Azerbaijan menolak pengakuan wilayah serta berbicara dengan perwakilan Nagorno-Kharabakh. Kemudian, PBB, CIS dan UE pun mengupayakan hal yang sama. Semua upaya mediasi gagal disebabkan kedua pihak bersikukuh atas klaimnya masing-masing. Dapat dilihat dari tindakan presiden Azerbaijan, Aliyev, yang sering berbicara tentang perebutan kembali wilayah Azerbaijan yang hilang. Wilayah Nagorno-Kharabakh sendiri merupakan wilayah yang subur dan kaya akan Sumber Daya Alam. Wilayah Nagorno-Kharabakh yang masyarakatnya sebagian besar berasal dari Armenia dengan sejarah berpuluh tahun silam bahwa itu wilayahnya membuat Armenia merasa dia berhak atas wilayahnya, terlebih Azerbaijan pernah tertuduh melakukan kejahatan Perang dengan cara pembersihan etnis di wilayah tersebut. Armenia dan Azerbaijan sejatinya belum pernah

menerima dengan lapang perbatasan negara mereka disebabkan pada Era Soviet, perbatasan yang tidak dirancang sebagai perbatasan internasional sehingga wilayahnya tidak dibatasi dengan adil.

Konflik antara Armenia dan Azerbaijan yang telah bertahun-tahun lamanya terjadi kini kembali memanas ketika terjadi perang di tahun 2020. Ketika Azerbaijan melancarkan serangan udara dan artileri, sementara Armenia mengumumkan darurat militer dan memobilisasi penduduk laki-lakinya. Perang skala penuh selama 6 minggu sejak 27 September 2020 di sepanjang garis kontak Nagorno-Kharabakh ini dimenangkan oleh Azerbaijan sebagai kelompok penyerang. Perang ini menghasilkan ratusan korban jiwa, mencakup warga sipil yang tidak bersalah atas peperangan ini. Dampak dari perang ini tidak hanya korban jiwa dan infrastruktur, tetapi juga berdampak terhadap lingkungan, sangat kompleks. Dampak tersebut menyebabkan terjadinya *ecocide*, yang berarti pemusnahan lingkungan sebagai bentuk kejahatan berat berdampak buruk terhadap lingkup luas bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya dalam wilayah tersebut.

Perang yang terjadi dalam era kontemporer itu tidak hanya terjadi secara langsung, namun juga melalui jejaringan nirkabel dan pemanfaatan media sebagai medan baru. Dalam Perang lama yang meletus pada 2020, media sosial berperan penting dalam *cyber warfare* dengan membentuk *framing*, yaitu *framing* 'kami' versus 'mereka'. *Framing* yang mencoba dibentuk oleh kedua belah pihak tentu berbeda. Dalam sudut pandang Armenia, berfokus pada penekanan kebenaran kebijakan yang diberlakukannya dengan menggambarkan pihak lawan atau Azerbaijan sebagai penyerang. Teknik *framing* yang digunakan dalam *frame* ini meliputi frekuensi berita, perbandingan, metafora stereotip, dan mitos. *Frame* tersebut berasal dari sumber berita Armenia yang dipercaya dengan penyampaian argumen yang kuat. Sedangkan Azerbaijan mencoba membantah hal tersebut dengan keterbatasan. Kebijakan Azerbaijan dalam bersosial media dibatasi dengan hanya mengizinkan penggunaan liputan internasional dalam pembentukan framing positif negara mereka dalam perang ini yang konfrontatif. Sedangkan Armenia, platform-platform seperti *facebook* memainkan peran penting dalam membentuk narasi dan mobilisasi dukungan terhadap Armenia. Pihak Armenia memanfaatkan media sosial untuk memberikan pembaruan tentang korban manusia, mempublikasikan daftar tentara Azerbaijan yang tewas, dan melawan propaganda Azerbaijan. Penulis mencoba berfokus pada gap perbedaan antara strategi *cyber warfare* media yang digunakan Armenia dan Azerbaijan sehingga akan membentuk komparasi.

METODE

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang disajikan secara deskriptif. Analisis kualitatif sendiri merupakan penelitian yang mengamini filsafat postpositivisme yang menolak objek penelitian tereksperimen, hanya berlaku untuk objek penelitian secara nyata dan natural serta menitikfokuskan pada peneliti. Selain data yang kredibel yang menjadi instrumen penelitian kualitatif, peneliti juga merupakan salah satunya. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif memfokuskan pada hasil penelitian dari kemampuan analisis. Metode kualitatif deskriptif ini

sesuai untuk memahami penggunaan media yang dimanfaatkan para aktor perang dalam membentuk legitimasi mereka dengan berbagai macam strategi dalam pemanfaatan jenis *cyber warfare*. Dengan penemuan perbedaan strategi yang digunakan oleh Armenia-Azerbaijan dalam pembentukan persepsi publik melalui media dalam *cyber warfare*, maka setelahnya, strategi dapat dikomparasikan. Pembacaan fenomena perbedaan strategi relevan dibaca melalui konsep framing dengan Teori Klasik milih Hubungan Internasional, Realisme, yang memandang aktor internasional akan menghalalkan segala cara demi tercapainya kepentingan nasional mereka serta mengutamakan kepentingan nasionalnya. Penyajian data dalam temuan dan pembahasan adalah dengan metode Qualitative dimana teori sudah meringkaskan data ketika proses filtrasi data, sehingga penyajian ini adalah hasil dari proses tersebut. Dalam hal ini termasuk dalam disinformasi dan propaganda, bahwa wacana bukan hanya seputar teks, tetapi juga interaksi. Dalam menggali data yang menunjang penulisan artikel ini, peneliti menggunakan teknik penggalan sumber data sekunder dengan dokumentasi.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi data. Demi mempertahankan kualitas emik dalam penulisan kualitatif, ketika peneliti menemukan kekacauan yang merupakan hal wajar, perlu kemudian untuk mengenali dan membereskannya. Dalam misi mempertahankan nilai Qualitative, peneliti menggunakan teknik Triangulasi dalam penelitian milik Denzin (1970) yang berusaha mempelajari suatu fenomena tertentu dari berbagai sumber yang berbeda, baik tipe analisis, peneliti, atau perspektif teoritis. Selanjutnya, perbedaan sudut pandang kemudian difiltrasi dan mencari data yang sesuai dengan posisi atau perspektif penulis. Kemudian melakukan refleksi cermat untuk melakukan analisis terhadap suatu fenomena yang diteliti. Triangulasi ini diterapkan agar menurunkan potensi bias dalam qualitative serta meningkatkan pemahaman terkait fenomena yang diteliti penulis.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Media bukan hanya membicarakan tulisan, tetapi juga interaksi yang dapat menggugah kesadaran publik selama 24 jam berturut-turut. Keefektifan media yang tanpa batas fisik memiliki ruang virtual seluas selama semua orang mampu terhubung dengan media merupakan alasan menguntungkan mengapa dalam perang konvensional yang besar ini, disematkan juga strategi non-konvensional dengan *Cyber warfare* dalam media. *Cyber warfare* banyak macamnya, namun dapat disimpulkan bahwa jenis serangan *cyber warfare* ada 5 macam menurut Osawa (2017), yaitu *Cyber Espionage*, *Cyber Sabotage*, *Cyber Subversion*, *Cyber Propaganda/Manipulation*, dan *Military Cyber Attack*. *Cyber Propaganda* yang menggunakan media dalam pelaksanaannya dan akan digunakan dalam membaca identifikasi serangan. Dalam hal ini menekankan pada opini publik.

1. Kebebasan pers dan informasi



Tingkat kebebasan pers antara Azerbaijan dan Armenia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Rezim otoriter Aliyev menentukan jalannya dan penyebaran informasi di Azerbaijan, salah satunya dilakukan dengan pembuatan akun telegram dan twitter yang dibawah naungan langsung pemerintah Azerbaijan. Jurnalis sudah seperti terpenjara, apalagi warga sipilnya, hal ini berakibat ketiadaan sumber informasi alternatif dalam pembungkaman peran dan penciptaan citra positif Azerbaijan.

Azerbaijan dalam kebebasan persnya yang rendah memulai perang informasi dengan penyebaran propaganda ofensif anti-armenia yang diorganisir langsung oleh lembaga dan negara. Dalam penyebaran informasi, Azerbaijan hanya dapat mengandalkan lembaga pemerintahan dan media internasional. Namun dalam hal ini, Azerbaijan dengan kekayaan alamnya dapat menarik kerjasama dan aliansi dengan negara dengan pengaruh tinggi dalam penyebaran informasi global, yaitu Inggris. Azerbaijan juga melakukan outsourcing terhadap perusahaan humas dan strategi asing.



Armenia yang memiliki kekuatan militer relatif lebih rendah daripada Azerbaijan memanfaatkan peluang dengan keterbatasan kebebasan pers dan informasi di Azerbaijan. Dibuktikan dengan tingginya partisipasi warga dalam perannya sebagai jurnalis warga. Armenia memiliki banyak

kelompok sukarelawan bertujuan menyebarkan informasi mengenai perang melalui berbagai saluran internasional, seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, V Kontakte dan YouTube. Selain itu, membentuk komentar dan hastag yang menciptakan citra mereka. Salah satunya oleh akun Hovhannisyanyan sebagai pencipta hastag-hastag tersebut. Tidak hanya warga, jajaran pemerintahan Armenia tidak berhenti membentuk framing positif selama 44 hari masa perang. Seperti Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, mengeluarkan pernyataan bahwa yang lebih dulu memulai penyerangan terhadap masyarakat sipil adalah pihak Azerbaijan.

2. Framing Azerbaijan versus Armenia

Armenia menggunakan strategi pembingkai 'kita' versus 'mereka'. Dalam pembentukan framing 'kita' vs 'mereka' adalah 'kita' sebagai pihak yang memiliki tekad kuat, berpengetahuan baik tentang wilayah yang berkonflik, keberanian, patriotisme, keadilan, dan sisi positif lainnya dalam misi pembentukan citra. Sedangkan 'mereka' dalam konteks Armenia adalah menunjukkan visual foto video persenjataan Azerbaijan yang dikalahkan dan tentara yang tewas atau lari dengan penyebaran informasi melalui akun yang terverifikasi atau centang biru pada social media. Dengan penyampaian penyebutan pihak Azerbaijan dengan sarkastik. Dalam hal ini, representasi Armenia membentuk citra negatif musuh dengan penggambaran Azerbaijan yang layaknya Turki bagi Armenia, yakni merujuk pada Genosida dan Teroris.

Dalam membentuk framingnya, Azerbaijan menggunakan strategi siaran langsung, dimana hal ini menyiarkan langsung peperangan konvensional dengan drone yang sebagian besar diproduksi oleh Turki. Jika salah satu drone hilang maka akan menyebabkan pengutan emosional dari para viewer yang menghasilkan kemenangan kecil bagi Azerbaijan dan Turki. Secara keseluruhan, siaran langsung ini dapat menciptakan realitas perang alternatif dan pembentukan kesadaran opini publik.

3. Pembentukan Kepercayaan

Kepercayaan sangat diperlukan dalam pembentukan legitimasi semasa perang. Dalam strategi Armenia 'kita' versus 'mereka' adalah penggambaran 'satu-satunya yang dapat dipercaya' dan 'tidak dapat dipercaya'. Namun Azerbaijan dalam penyebaran berita palsu berhasil dalam konteks ini, adalah 589 akun Facebook, 7.906 halaman dan 447 akun Instagram terlibat seperti berkoordinasi dalam mendukung Azerbaijan. Dalam pembentukan kepercayaan mencakup meme viral, bahasa penyampaian, akun pemberi informasi juga hastag.

4. Disinformasi dan Propaganda

Propaganda dan disinformasi merupakan dasar dari pembentukan citra positif pihak sendiri dan negatif pihak oposisi. Disinformasi sendiri merupakan informasi yang salah dan sengaja disebarkan. Propaganda yang dilakukan Armenia dibentuk melalui penyebaran hastag "#ArtsakhStrong, #RecognizeArtsakh, #NoPeace dan selain itu juga menyebarkan berita tentang dampak penyerangan oleh Azerbaijan dan korban jiwa yang disertai dengan visual foto dan video. Selain itu, Armenia juga menyebarkan disinformasi mengenai penggunaan senjata kimia massal berbahasa oleh Azerbaijan

yaitu 'White Porporus' yang selain menyebabkan kematian juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Namun, Propaganda yang dilontarkan Armenia bertentangan dengan propaganda resmi. Sedangkan Azerbaijan menyebarkan berita palsu kematian Armenia yang diambil dari daftar pemilu. Lalu membahas tentang pernyataan Aliyev, presiden Azerbaijan' yang mempertanyakan asal senjata yang digunakan tentara Armenia dalam berperang. Tidak hanya itu, propaganda yang sarkastik juga ditemukan dalam sebuah komentar yang berisikan ejekan kebiasaan buruk bangsa Armenia.

5. Aliansi dan Kerja Sama

Sumber daya yang melimpah ruah yang menjadi kertetarikan tersendiri bagi negara lain untuk melakukan Kerjasama dengan Azerbaijan, terutama dalam hal teknologi dan informasi. Inggris menjadi salah satu aktor berpengaruh dalam pecahnya konflik tahun 2020 ini dengan membantu memframing citra Azerbaijan dalam medianya yang memiliki legitimasi kuat dalam lingkup global. Liputan Inggris menginformasikan kepada dunia bagaimana Armenia menginvasi dan menghancurkan Kharabakh dalam masa 27 September – 10 November 2020.

Dalam konteks kerjasama dan aliansi, Armenia hanya menggunakan strategi ini dalam sektor peran konvensional untuk memperkuat posisinya saja, Yaitu membentuk strategi sebagai katalisator untuk membentuk organisasi keamanan regional baru yang menggabungkan kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Penandatanganan kesepakatan strategis yang mencakup pertukaran sumber daya, intelijen, dan dukungan militer dapat menciptakan aliansi yang tangguh.

Diskusi

Secara bahasa, cyber warfare merupakan teknik untuk memperoleh data dan pengetahuan, menghilangkan data milik lawan dengan tujuan tertentu yang menyebabkan kerusakan atau gangguan. Sedangkan pengertian menurut militer adalah tindakan suatu bangsa-negara guna membobol jaringan komputer negara lain demi mencapai kepentingannya. Salah satu tools dalam strategi *cyber warfare* adalah penggunaan media dengan target utama opini publik. Jika memenangkan opini publik, maka akan memenangkan konflik dalam jangka panjang, begitulah menurut Saad dalam artikelnya. Bernays juga berargumen tentang penekanan peran pemerintah dalam pembentukan berita untuk menggiring opini publik.

Fakta bahwa media kini berpengaruh luas terhadap segala aspek kehidupan adalah realitas yang tak terbantahkan. Media sebagai salah satu alat yang hadir untuk kemudahan, dengan segala interdependensi manusia pada aspek tersebut, menghasilkan kerentanan yang tak terelakkan. Dalam lingkup global, kini media seringkali digunakan untuk kepentingan para aktor dalam mencapai tujuan mereka. Sebagaimana yang terjadi dalam perang Kharabakh tahun 2020 dimana kedua aktor, Armenia dan Azerbaijan memanfaatkan peran media sebagai penarik simpati publik dengan pembentukan opini yang meyakinkan. Strategi media yang diterapkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Maka, penulis menyajikan dua gambaran dalam hal ini:

1. Strategi Media Armenia

Armenia dalam mengatur kebebasan informasi tercantum dalam pasal 42 konstitusi republik Armenia yang menyatakan bahwa 'Setiap orang berhak untuk secara bebas menyatakan pendapatnya' dalam hal ini termasuk secara bebas untuk berpendapat, mencari pendapat dan menerimanya, serta menyampaikan argumen pribadi melalui media apapun. Tidak hanya itu, pasal 4 UU tentang penyebaran informasi masa juga mengacu pada terjaminnya kebebasan dalam menyebarkan informasi yang berbunyi 'produk media diproduksi dan disebarluaskan tanpa registrasi, perizinan, deklarasi atau pemberitahuan kepada negara atau badan negara manapun'. Dengan demikian, para aktor dan individu yang bergerak di bidang jurnalistik bergerak berdasarkan prinsip kesetaraan, supremasi hukum, kebebasan berpendapat serta pluralisme. Oleh karenanya, Armenia memiliki tingkat kebebasan pers yang relatif tinggi dengan jaminan dilindungi oleh Undang-Undang, namun juga diimbangi dengan peraturan ketat lainnya. Sejak 2004, Armenia juga melarang penggunaan sensor dalam media, pemaksaan terhadap kegiatan informasi dalam penyebarannya, menghalangi kegiatan jurnalis, diskriminasi dalam media yang digunakan untuk penyebarluasan informasi, pembatasan penyebaran media di lingkup domestik dan global. Tidak hanya dua pertauran tertulis ini dalam menata penggunaan media di Armenia, adapulapada beberapa pasal lain sebagaimana UU pasal 19 tahun 2001 dimana semua tertata dengan baik dengan peran jurnalisme warga yang signifikan kepada konflik ini.

Dalam upaya pertahanan, Armenia menerapkan strategi framing melalui media sebagai sarana untuk mempengaruhi persepsi publik, menyampaikan pandangan politik, dan mendapatkan dukungan global. Media telah menjadi platform penting untuk diskusi politik, pemberitaan konflik, serta untuk mengartikulasikan opini dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dunia untuk posisi Armenia dalam konflik wilayah tersebut. Armenia mencoba membangun narasi di media yang menekankan bahwa mereka adalah pihak yang menjadi korban agresi dari tindakan provokatif atau serangan oleh Azerbaijan. Upaya framing ini disertai laporan tentang kerugian manusia dan materiil di pihak Armenia serta menyoroti dampak kemanusiaan dari konflik tersebut. Sebaliknya, media Armenia menggambarkan Azerbaijan sebagai pihak yang bersikap agresif atau penjajah terhadap wilayah yang diklaim oleh Armenia. Pemberitaan menekankan tindakan militer Azerbaijan yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan hak Armenia.

Selain framing sebagai korban agresi, Armenia juga menyoroti pentingnya Hak Asasi Manusia dalam strategi defense nya. Framing melalui lensa HAM mencakup penekanan pada perlindungan warga sipil, terutama kelompok etnis tertentu, dan menggambarkan upaya Azerbaijan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Media Armenia menggunakan pilihan kata dan frasa yang menciptakan respons emosional untuk meningkatkan dampak dari framing media ini sendiri. Contohnya seperti menggambarkan serangan sebagai "serangan brutal" atau "pelanggaran hak asasi manusia". Hal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap persepsi publik terhadap konflik yang

terjadi. Dampak konflik terhadap populasi sipil, termasuk pengungsi dan kerusakan infrastruktur sipil, juga digunakan untuk memperoleh simpati internasional.

Selain itu, Armenia memanfaatkan medianya yang disebarakan melalui web atas tuduhan *ecocide* kepada Azerbaijan dimana melanggar pasal 2 ayat 3 PBB Charter yang berbunyi '*All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered*'. Propaganda ini berisikan tuduhan perusakan lingkungan yang disuarakan oleh masyarakat internasional juga pemerintah Armenia. *Ecocide* sendiri berasal dari dua kata yaitu *eco* dan *genocide* dimana dinilai sebagai bentuk kejahatan yang besar bagi manusia serta makhluk hidup lainnya dalam wilayah tersebut. Azerbaijan tertuduh menggunakan senjata *White Phosphorus* yang membawa bahan kimia berbahaya dari asap putihnya yang berdampak pada cacat tubuh ataupun punahnya suatu makhluk hidup selamanya. Selain itu, Azerbaijan juga digambarkan sebagai kelompok 'Turki' bagi Armenia, yaitu mengarah pada teroris dan genosida.

Pemerintah Armenia juga berupaya melakukan framing di media sosialnya untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik selama perang Karabakh 2020. Mereka sangat memanfaatkan platform media sosial sebagai tempat untuk mendapatkan dukungan publik, serta meluruskan informasi-informasi dan propaganda yang telah dibuat oleh Azerbaijan. Media sosial digunakan untuk menyuarakan bahwa Azerbaijan memiliki niat untuk merebut kendali atas Nagorno-Karabakh setiap kali ada kesempatan. Mereka menggunakan platform seperti Instagram, Youtube, Facebook, dan Twitter untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional serta menyebarkan informasi terkait isu-isu yang dihadapi.

Dengan kekuatan militer yang relatif lebih rendah dibandingkan Azerbaijan pada konteks perang Karabakh tahun 2020 dengan bantuan Turki, Armenia memanfaatkan kebebasan pers dengan berbagai jurnalisisme warganya yang berperan cukup signifikan, salah satunya adalah Hovhannisyan dalam akun Facebooknya. Di Armenia, media sosial dengan tingkat penggunaan tertinggi kala itu adalah Facebook. Selain itu, hastag dalam pembingkaiannya ini juga banyak ditemukan, misalnya #ArtsakhStrong #RecognizeArtsakh, #NoPeace, dan lainnya. Slogan perang 'Kami akan ikut' juga dipopulerkan oleh Hovhan pada jam pertama perang sehingga tagar tersebut cepat viral dan tidak hanya digunakan dalam komunikasi visual, tetapi juga online dan offline. Dalam laman facebook, ditemukan sebanyak 222.000 postingan berhashtag serupa. Namun, ketidakjelasan makna yang diberikan melalui hastag tersebut, menjadikan kenaikan polarisasi yang menguntungkan bagi Armenia menyebabkan diskusi panjang pasca perang dan beresiko terhadap goyahnya persatuan nasional.

Kampanye yang dilakukan di media sosial yang tersebut sebenarnya bertujuan untuk menyebarkan kesadaran mengenai konflik Nagorno-Karabakh merupakan sebuah langkah yang efektif dalam menyampaikan informasi dan menyediakan dukungan internasional. Para pejabat Armenia menggunakan media sosial secara aktif selama 44 hari terjadinya perang dan memberikan dukungan terhadap kelompok separatis Republik Nagorno-Karabakh dalam perang ini. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, mengeluarkan pernyataan bahwa yang lebih dulu memulai

penyerangan terhadap masyarakat sipil adalah pihak Azerbaijan. Azerbaijan menembaki Khankendi di Nagorno Karabakh dimana itu adalah wilayah daerah yang padat dengan penduduk sipil. Penggunaan media sosial secara maksimal untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai konflik Nagorno-Karabakh telah memberikan dampak pada opini publik di Armenia. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai wadah untuk memberikan informasi juga dapat menuai pro dan kontra terhadap konflik Nagorno-Karabakh seperti masyarakat Armenia yang secara umum mendukung perang tersebut, akan tetapi juga tidak ragu untuk mengomentari keputusan-keputusan taktis yang diambil oleh Pemerintah Armenia.

Dalam hal kebebasan bersosial media, pemerintah Armenia selain melindungi juga membatasi dengan peraturan-peraturan terbaru agar tetap mempertahankan elektabilitasnya dalam penyebaran informasi di tengah perang 2020 tersebut. Sebagaimana pada hari ke-4 warga dilarang menggunakan tiktok karena menyebarkan informasi sensitif militer dimana hak ini dapat membahayakan Armenia dan menguntungkan oposisi. Selain itu, Armenia juga mengenakan sanksi bagi konten-konten yang bersifat membahayakan dengan terdeteksi 309 kasus, 72 diantaranya terkena denda.

2. Strategi Media Azerbaijan

Dalam penyebaran informasi, pihak Azerbaijan tidak memberikan informasi mengenai korban jiwa di pihak mereka, tetapi menerbitkan daftar korban palsu dari Armenia yang diambil dari daftar pemilih. Selain itu, Azerbaijan juga memanfaatkan sosial media telegram sebagai media yang dikendalikan pemerintah Azerbaijan dalam strateginya, dan ini dilakukan sejak perang 2016. Hal tersebut dilakukan oleh rezim pemerintahan otoriter Aliyev yang memperketak saluran dan penyebaran informasi di Azerbaijan. Disana media dan internet menjadi memiliki batas, jurnalis terpenjara apalagi para warga biasa, hal tersebut dapat menghambat peluang peliputan media alternatif mengenai pembingkaiakan perang.

Dengan tingkat kebebasan pers yang rendah dan cenderung otoritarisme, Azerbaijan memanfaatkan media dalam membentuk framing 'media yang terpercaya'. Kepercayaan dalam era ini diperlukan untuk membentuk legitimasi. Pihak Azerbaijan menyebarkan berita palsu yang berhasil membingkai narasinya dan memanfaatkan platform media sosial untuk para masyarakatnya melalui kolom komentar. Dibuktikan dengan adanya penghapusan jaringan yang berasal dari Azerbaijan mencakup 589 Facebook, 7.906 halamannya serta 447 akun instagram yang terlibat dalam satu jaringan dalam membentuk pola dukungan terhadap Azerbaijan. Dibuat secara sengaja oleh Azerbaijan dalam meningkatkan propaganda melalui komentar.

Dalam menanggapi tuduhan *ecocide* Armenia, Azerbaijan menuduh dengan menyebarkan video berisikan orang-orang Armenia yang membakar sarang lebah, pepohonan ketika melarikan diri dari wilayah Nagorno-Kharabakh ditengah kesimpangsiuran berita yang beredar. Namun baik Armenia atau Azerbaijan sama-sama memiliki tuduhan yang belum terbukti. Selain itu, Azerbaijan yang berpandangan bahwa keunggulan senjata adalah suatu yang penting, ia melakukan siaran langsung ketika perang dengan pesawat drone yang sebagian diproduksi oleh Turki. Dalam hal ini, jika drone

menghilang maka akan menyebabkan tarikan emosional bagi para penontonnya sehingga akan membuat kemenangan kecil bagi Azerbaijan dan Turki.

Tidak hanya itu, Azerbaijan juga melakukan Aliansi dan kerjasama dengan Inggris dalam hal teknologi informasi. Inggris sebagai negara dengan lembaga pers terpercaya membantu memframing citra positif Azerbaijan dengan menggambarkan kekejaman Armenia dalam memporakporandakan Kharabakh. Namun fakta yang ditemukan peneliti adalah bahwa Azerbaijan adalah negara dengan SDA melimpah, khususnya minyak dan gas. Terdapat kepentingan elektual perusahaan Inggris yang bertepatan dengan meletusnya perang tahun 2020 ini. Sedangkan Azerbaijan tanpa pikir panjang menyetujui untuk mendapat akses ke elit politik dan intelektual Inggris melalui badan tersebut. Sebagaimana *The Guardian* dalam menganalisis konflik ini mampu untuk membentuk pandangan yang subjektif dengan menyajikan rentetan peristiwa tidak lengkap dan sebagian besar disampaikan berdasarkan kepentingan Armenia. Dengan demikian, *The Guardian* menunjukkan simpatinya kepada Azerbaijan tidak hanya dalam bentuk narasi berita, tetapi juga visual foto dan video.

KESIMPULAN

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji peran media dalam strategi *cyber warfare* perang perebutan wilayah paling 'beku' yang sulit terselesaikan. Analisis pola framing dan komunikasi dalam pendekatan konsep propaganda dan disinformasi, peneliti mengungkap adanya strategi yang berbeda signifikan oleh kedua aktor. Frekuensi media sebagai penyebar informasi dalam jangka waktu pendek dengan jangkauan seluas media itu bisa dijangkau, menjadi pilihan efektif bagi para aktor dalam melibatkan media ke dalam perang etnis berdarah ini, terlebih media dapat menjaga bahkan menggugah kesadaran opini publik selama 24 jam non stop.

Regulasi sistem informasi kedua negara yang berbeda secara signifikan menjadikan strategi yang mereka ambil berbeda pula menghasilkan komparasi strategi media. Armenia dengan kebebasan pers tinggi yang telah dimuat dalam UUNya membuat tidak hanya situs resmi dan jurnalisme saja yang bergerak, namun juga banyak Warga Armenia yang pada akhirnya dengan sukarela terlibat dalam perang informasi dan hadir sebagai jurnalisme warga dengan dampak signifikan terhadap opini publik. Sedangkan regulasi Azerbaijan yang ketat dan cenderung otoriter dalam kebebasan informasi hanya dijalankan oleh pemerintah saja dan membuat jurnalisme bak terpenjara menyebabkan sistem informasi hanya berjalan satu arah, namun jalan lain yang ditempuh Azerbaijan adalah kerjasama dengan lembaga pers terkemuka dunia, Inggris. Pesan yang digunakan dalam penyampaian 'interaksi' dalam 'narasi' yang disebarkan disertai visual foto-video melalui media didukung dengan penggunaan hastag, personifikasi, konten viral, bahasa sehari-hari, dan lain sebagainya yang relevan dengan perkembangan dunia digital pada sosial media. Framing yang ditemukan lainnya adalah bahwa masing-masing pihak memandang diri mereka sebagai korban agresi pihak lain dan menyerukan

keadilan, yang ditafsirkan bahwa penggunaan media disesuaikan dengan kepentingannya masing-masing yang dalam hal ini sejalan dengan teori klasik Hubungan Internasional, Realisme.

REFERENSI

- ANAHIT HAKOBYAN, "Armenian Digital Communications in Kharabakh War of 2020: Critical Discourse Analysis", *Jurnal Sosiologi Politik* № 1 (2021): 32-48
<https://doi.org/10.46991/BYSU:F/2021.12.1.032>
- Arthur Atanesyan. "Media Framing on Armed Conflicts: Limits of Peace Journalism on the Nagorno-Karabakh Conflict", *Journal of Intervention and Statebuilding*, 14.4, (2020): 534–50
<<https://doi.org/10.1080/17502977.2020.1780018>>
- Bernays E. Crystallizing public opinion. New York, NY: IG Publishing, 1923.
- CNBC Indonesia, *Awas! Perang Meletus Armenia vs Azerbaijan, Migas Warning*, (28 September 2020). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200928065826-4-189810/awas-perang-meletus-armenia-vs-azerbaijan-migas-warning>
- Cognitive Therapy, dkk., "Isu Kejahatan Perang dalam Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh" , *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 1, (2018): 6-63
[tp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006)>.
- Edwin Tambunan. "Realisme Politik Morgenthau: Suatu Tinjauan Singkat". (2010): 4
- Foucault M. *Power/knowledge: Selected interviews and other writings.*(New York: Pantheon, 1980)
- Gindarsah, I., & Haryani, S. "Meninjau Konflik Armenia-Azerbaijan: Prospek dan Modalitas Peran Indonesia". *Analisis CSIS*, 42(3) 2023.
<https://journals.csis.or.id/index.php/analisis/article/view/410>
- Gleicher N. Menghapus Perilaku Tidak Otentik Terkoordinasi. <https://about.fb.com/news/2020/10/menghapus-laporan-perilaku-tidak-autentik-terkoordinasi-september/> (diakses 8 Desember 2023).
- Hanna Arinawati, Fathimah Azzahrah Putri, and Shereena El Islamy, "Masalah Kemanusiaan Hingga Lingkungan Hidup: Studi Kasus Konflik Nagorno-Karabakh (Azerbaijan Vs Armenia)", *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 2.3 (2021): 235–67
<<https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13304>>.
- Hizbullah Arief. Mengurai "Ecocide" untuk menyelamatkan Lingkungan? <https://www.walhi.or.id/mengurai-ecocide-untukmenyelamatkan-lingkungan>. (diakses 8 Desember 2023)
- Iskandaryan A. THE SECOND KARABAKH WAR, OR THE FIRST POSTPOST-SOVIET WAR

- Caucasus Intitute, 1-17. 2020
- Kocharyan S. This is 5th generation warfare, says Armenian military expert. URL: <https://armenpress.am/eng/news/1029560.html>(27.04.2021). Kopalyan N. War, Nothing But War: The Virtue of Brute Force and the Shortcomings of Diplomacy. URL: <https://www.evnreport.com/spotlight-karabakh/war-nothing-but-war-the-virtue-ofbrute-force-and-the-shortcomings-of-diplomacy> (diakses 8 Desember 2023)
- Muhamad Afi Fatoni. "Kegagalan Upaya Mediasi Antara Armenia Dan Azerbaijan Dalam Konflik Nagorno-Karabakh Muhammad", *Journal of International Relations*, 5.3, (2019): 448–57.
- Mumim Ahmad Khan, "The Conflict of Azerbaijan and Armenia With Special Reference To Nagorno Karabakh : An Overview", *Shodh Sarita*, 8.29 (2021): 146–51.
- N. Hakhverdyan, penduduk Tiktok semasa Perang Dunia Armenia. URL: <https://media.am/hy/newsroom/2020/10/01/24384/> (diakses 8 Desember 2023).
- Review of legislation of the Republic of Armenia: Mass media (media) – <https://digital.report/zakonodatelstvo-armenii-smi/>, (diakses 7 Desember 2023).
- Ronald J. Chenail. Keeping Things Plumb in Qualitative Research. Vol.3 Article 6. 1997.
- Saad, dkk., "Asymmetric Cyber-warfare between Israel and Hezbollah: The Web as a new strategic battlefield". (2014): 1-5
- Serhiy Danylenko & Maryna Grynchuk. Peculiarities of media functioning in Armenia. 2023.
- Soso Dzamukashvili, 'A Peace Treaty between Azerbaijan and Armenia : Elusive but Possible ? A PEACE TREATY BETWEEN AZERBAIJAN AND ARMENIA : ELUSIVE BUT', (August, 2023).
- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif" (2019): 18
- T H E Arts and others, *The RAND Corporation Is a Nonprofit Research Support RAND Purchase This Document Make a Charitable Contribution For More Information Visit RAND at Wwww.Rand.Org, Distribution* (2010) <<https://doi.org/RAND>>.
- X-ray Diffraction Crystallography, "Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know", (2016)" 1–23.
- Yadulla, "The Second Karabakh War through the Prism of the Most Influential British Press, 27 September-10 November 2020" (2021): 53-58